

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Hamid S., *Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Negara)*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Ctk. Ketiga, Muassasah Ar-Risalah.*

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Ctk. Pertama, PT. Raja-Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Amir Ilyas & Haeranah, *Hukum Pidana Materil & Formil: Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, 2015.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.

Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Bryan A. Gamer, *Black's Law Dictionary With Guide To Pronunciation*, West Publishing, St. Paul, 1999.

Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan kedua, Jakarta, Kencana, 2006.

D. Schaffmeister, Nico Keijzer dan E.P.H. Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.

Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.

I Made Widyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Institute for Criminal Justice Reform, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Pidana", Desember 2015.

Irfan, Nurul, dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, Amza, Jakarta, 2013.

J.E. Sahetapy dan Agustinur Pohan, *Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

Klaus Vogel et al, *Klaus Vogel on Double Taxation Conventions. A Commentary to the OECD, UN, and US Model Convention for the Avoidance of Double Taxation of Income and Capital With Particular Reference to German Treaty Practice, Third Edition*, The Hague: Kluwer Law International, 1997.

Krismiarsi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*, Pustaka Magister, Semarang, 2018.

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, 1997.

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, 1997.

M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002.

Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019.

Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Jakarta, 2007.

Moeljatno, *Asas-asas hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*,
Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Muhammad Natsir, *Korporasi Antara Sanksi dan Tindak Pidana Lingkungan di
Aceh*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*,
Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.

UNODC dan Komisi Pemberantasan Korupsi RI. *Buku Panduan Investigasi
Mengenal Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Dalam Kasus Tindak
Pidana Korupsi*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Kerja Antar Komisi dan
Instansi KPK, 2020.

Paku Utama dan Vauline Frilly, *Anti-Gatekeeper & Investigasi Forensik*, PT
Wikrama Utama Indonesia, Jakarta, 2018.

Rahmat Sholihin, *Hidup Berkonstitusi Perspektif Qur'an*, Total Media, Yogyakarta,
2012.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua
Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2016.

S.P. Meyer, "The Meaning of Beneficial Ownership and The Use Thercof For tax Treaty Shopping and Tax Avoidance," Pretoria, Greek: University of Pretoria, 2010.

S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETAHAEM, Jakarta, 1986.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Bandung, tt.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984).

Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, CV. ARMICO, Bandung, 1990.

Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Sutedi, A. *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.

T.N. Syamsah, *Tindak Pidana Perpajakan*, Alumni, Bandung, 2011.

Tim Grahamedia Press, *KUHP & KUHP*, Grahamedia Press, Surabaya, 2012.

Jurnal

Adolfo Martin Jimenez, “Beneficial Owner: Current Trends,” *World Tax Journal* (2010).

Amar Bank, Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Edisi 2017.

Annisa Fitria, “Kedudukan *Beneficial Owner* Dalam Perseroan Terbatas Dalam Hukum Positif di Indonesia”, *Lex Jurnalica*, Vol. 19, No. 1, April 2022.

Ariani, N. V. (2020). *Beneficial Owner: Mengenal Pemilik Manfaat dalam Tindak Pidana Korporasi*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.20. (No.1).
Retrieved from
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/984>.

Armansyah, A. (2018). *Beneficial Ownership Dan Kewajiban Pelaporan Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan*. *Jurnal Adil*, Vol.9, (No.2).

Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum POSITUM* Vol.5, No.2, Des 2020.

Balitbang Hukum dan HAM. (2019). *Hasil Penelitian Tentang Beneficial Owner Dalam Tindak Pidana Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Burhan Jatmiko, Paramita Prananingtyas, Kajian Yuridis Ketentuan Mengenai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) Perseroan. NOTARIUS, Vol.16 Nomor 1 (2023).

Burhan Jatmiko, Paramita Prananingtyas, Kajian Yuridis Ketentuan Mengenai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) Perseroan. NOTARIUS, Vol.16 Nomor 1 (2023).

Burhan Jatmiko, Paramita Prananingtyas. Kajian Yuridis Ketentuan Mengenai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) Perseroan. NOTARIUS, Vol.16 Nomor 1 (2023).

Burhan Jatmiko, Paramita Prananingtyas. Kajian Yuridis Ketentuan Mengenai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) Perseroan. NOTARIUS, Vol.16 Nomor 1 (2023).

Dahtiar, Penerapan Teori Pidana Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI).

Erik Vermeulen, “Beneficial Ownership and Control: A Comparative Study – Disclosure Information and Enforcement, *OECD Corporate Governance Working Papers*”, *OECD Publishing*, No. 7, (2013).

Gunawan Widjaja, “*Nominee Shareholders* Dalam Perspektif UUPT Baru dan UU Penanaman Modal Baru Serta Permasalahannya Dalam Praktik” dalam Jurnal Hukum dan Pasar Modal Volume III Edisi 4, Agustus-Desember 2008.

Husein, Y. (2018). Diseminasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Retrieved from JDIIH PPATK website: www.jdiih.com.

Lucky Suryo Wicaksono, “Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23, No. 1, Januari 2016.

M. Ilham Wira Pratama, “Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Economic Analysis of Law)”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 3, No. 1, Maret 2022.

Nivia, “Dualisme Pengaturan Beneficial Ownership di Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 35, No. 1, 2013.

Rony Walandouw, *Unsur Melawan Hukum yang Subjektif dalam Tindak Pidana Pencucian Pasal 362 KUHP*, *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 3, 2020.

Salman Luthan, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi Di Bidang Keuangan, Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal Dan Pencucian Uang*, *Disertasi* (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007).

Sutarto S., 'Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pidanaan Relatif', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, volume 2.issue 1 (2021)
<https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.18>.

Syahrijal Syakur, Pertanggungjawaban Pidana oleh Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagai Pelaku Pencucian Uang dan Kejahatan Lainnya dalam Perseroan Terbatas. *Journal of anti-money laundering/countering the financing of terrorism*. Vol. 01 No. 01 (Desember 2022).

Teng Junaidi Gunawan, "Kajian Limitasi Maksimum Sanksi Pidana Kejahatan Ekonomi – Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum", *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2022.

The Financial Action Task Force (FATF), "Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures United Kingdom Mutual Evaluation Report", *FATF France*, 2018.

The Law Library of Congress, "Disclosure of Beneficial Ownership in Selected Countries", *Global Legal Institute Research Center*.

Tiono dan Sadjiarto, "Penentuan Beneficial Owner untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda", *Tax & Accounting Review*, Vol. 3, No. 2, (2013).

Toruan, “Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law”,
Jurnal Hukum To-Ra, Vol. 3, No. 1, (2017).

Toruan, H. D. L. (2017). Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model
Omnibus Law. *Jurnal Hukum To-Ra*, Vol.3, (No.1).

Makalah

Barda Nawawi Arief, “Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan
Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern”, (Makalah disampaikan
pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang
Mengalami Modernisasi, yang diselenggarakan oleh BPHN-UNAIR
Surabaya, 25-27 Februari 1980), Bina Cipta, Bandung, 1982.

Skripsi

Nila Tari, “Tinjauan Yuridis Beneficial Ownership Pada Perseroan Terbatas Dalam
Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN*
Jakarta, 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru.

Peraturan Menkuham Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prinsip
Mengenali Manfaat (*Beneficial Ownership*) dari Korporasi.

Peraturan Menkuham Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan
Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat atas Korporasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Pencucian Uang dan Kejahatan Pendanaan Terorisme.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Data Elektronik

Financial Action Task Force, 'International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendation' 2016, <http://www.fatf->

gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf.

<https://antikorupsi.org/id/setengah-hati-transparansi-beneficial-ownership-korporasi>, terakhir diakses pada tanggal 3 juli 2024.

<https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/11840/3/Bab%20II.pdf> terakhir diakses pada tanggal 17 Juli 2024.

<https://www.hukmonline.com/klinik/a/subjek-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana-lt52bdf2508616/>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2024.

J. David B. Oliver, Jerome B. Libin, Stef van Weeghel and Charl du Toit, “Beneficial Ownership”, Bulletin for International Bureau of Fiscal Documentation, Juli 2000.

OECD. (2019). *Ownership Implementation Toolkit*.

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi,

<https://stranaspk.id/publikasi/berita/berkaca-kasus-alun-perkuat-aksi-pemanfaatan-data-penerima-manfaat-beneficial-ownership-korporasi-untuk-cegah-korupsi>, terakhir diakses pada tanggal 18 Juli 2024.

